

DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PENGUSAHAAN
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

NO	PERIZINAN BERUSAHA
I	Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pelabuhan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Usaha Badan Usaha Pelabuhan 1.2. Penetapan Lokasi Pelabuhan, berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional 1.3. Pembangunan Pelabuhan 1.4. Pengoperasian Pelabuhan 2. Izin Terminal Khusus <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Penetapan Lokasi 2.2. Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus 2.3. Pengoperasian Terminal Khusus 3. Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Penetapan Lokasi TUKS 3.2. Pembangunan atau Pengembangan TUKS 3.3. Pengoperasian TUKS 4. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perairan <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Usaha Bongkar Muat 4.2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 4.3. Usaha Tally Mandiri 4.4. Depo Peti Kemas 4.5. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Jasa Terkait dengan Angkutan Laut 4.6. Pengoperasian Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan 4.7. Usaha Angkutan Multimoda 4.8. Usaha Keagenan Kapal 5. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 5.2. Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 6. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 6.2. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Angkutan Laut 8. Izin Usaha Suplai Bahan Bakar Minyak di Pelabuhan 9. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal 10. Izin Keruk dan Reklamasi <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Kegiatan Kerja Keruk 10.2. Lokasi Reklamasi 10.3. Kegiatan Kerja Reklamasi
II	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Izin Layak Operasi Insinerator
III	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing 2. Izin Usaha Kawasan 3. Persetujuan Impor 4. Izin Importir Terdaftar 5. Izin Eksportir Terdaftar 6. Surat Keterangan Asal 7. Rekomendasi Pengeluaran Sementara ke TLDDP 8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan
IV	Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing (PMA) 2. Izin Usaha Kawasan Industri PMA 3. Izin Perluasan Kapasitas Industri PMA 4. Izin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dan Izin Usaha Sementara untuk Keperluan Tertentu 5. Persetujuan Pemasukan Barang Industri 6. Persetujuan Pengeluaran Barang Industri 7. Persetujuan Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang Ditunjuk 8. Izin Perluasan Kawasan Industri
V	Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Izin Usaha Penggunaan Sumber Daya Air 3. Izin Penggunaan atau Pengambilan Air Baku 4. Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Bersih 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah 6. Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 7. Izin Pemanfaatan Limbah B3 8. Izin Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu

NO	PERIZINAN BERUSAHA
VI	Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan 1. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 2. Izin Usaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam 3. Izin Usaha Pengelolaan Jasa Pariwisata Alam 4. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan 5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan 6. Izin Pemungutan Hasil Hutan 7. Izin Usaha Sarana Pariwisata Alam 8. Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Hutan Konservasi 9. Izin Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
VII	Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Izin Usaha Wilayah Kelistrikan 2. Izin Kegiatan Pencampuran (<i>Blending</i>) Bahan Bakar Minyak
VIII	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan 1. Izin Lokasi Reklamasi di Wilayah Pesisir 2. Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir 3. Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 Deputi Bidang Perundang-undangan dan
 Administrasi Hukum,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman